

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
IDENTIFIKASI DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 1954-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial dengan menyusun identifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2014 tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan harus disesuaikan dengan kondisi terkini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG IDENTIFIKASI DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 1954-2018.

Pasal 1

- (1) Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 terdiri atas:
 - a. bab I, pendahuluan;
 - b. bab II, kajian;
 - c. bab III, pelaksanaan; dan
 - d. bab IV, penutup.
- (2) Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 dilakukan terhadap:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden; dan
 - d. Peraturan Menteri.
- (2) Identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan:
 - a. periode dan daya laku; dan
 - b. bentuk dan daya laku.
- (3) Tabel identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2014 tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1964), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1307

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
IDENTIFIKASI DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN
SOSIAL TAHUN 1954-2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan keputusan dan/atau tindakan administrasi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Keputusan administrasi tersebut dapat berbentuk peraturan perundang-undangan atau bukan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Kemudian Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-

Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Kementerian Sosial dalam hal ini merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hal tersebut diperjelas dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial menyatakan:

“Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Kemudian Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kebijakan yang bersifat internal merupakan kebijakan yang mengatur internal Kementerian Sosial seperti bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengawasan. Adapun kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang mengatur objek di luar Kementerian Sosial yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, seperti tata cara pemberian program keluarga harapan, penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, dan tata cara pemberian program bantuan sosial pangan.

Kebijakan internal dan kebijakan eksternal tersebut ditetapkan dalam bentuk naskah hukum. Adapun naskah hukum yang berupa peraturan perundang-undangan terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan Peraturan Menteri Sosial. Sedangkan naskah hukum yang bukan berupa peraturan perundang-undangan terdiri atas keputusan, instruksi, surat edaran, keputusan bersama menteri, peraturan Eselon I, dan Eselon II, kesepakatan bersama/nota kesepahaman/memorandum saling pengertian, dan perjanjian kerja sama.

Sejak berdirinya Kementerian Sosial pada tahun 1945 sampai dengan tahun 2018 terdapat peraturan yang tidak terkodifikasi oleh Kementerian Sosial. Untuk itu, identifikasi ini mulai dilakukan sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2018. Dalam perjalanannya terdapat peraturan-peraturan yang mengalami disharmonisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Oka Mahendra dalam tulisannya, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan “terdapat 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmonisasi, sebagai berikut:

- a. pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam waktu yang berbeda;
- b. pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas, atau penggantian;
- c. pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d. lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;

- f. belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.”

Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya disharmonisasi antar peraturan yakni menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan di lapangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, peraturan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan disfungsi hukum dimana hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Lebih lanjut Oka menyatakan untuk mengatasi disharmonisasi peraturan perundang-undangan terdapat 3 (tiga) cara yaitu:

- a. mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya;
- b. mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif; dan
- c. menerapkan asas hukum/doktrin hukum.”

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam melakukan penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial perlu dilakukan identifikasi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

B. Tujuan

Penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial ini bertujuan:

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial; dan
2. Meminimalisasi disharmonisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial.

C. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari program penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial adalah terdokumentasinya peraturan perundang-undangan sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2018 yang memuat hasil revidi dan evaluasi yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan deregulasi dan regulasi.

BAB II

KAJIAN

A. Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.”

Untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Kementerian Sosial menyusun Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di lingkungan Kementerian Sosial. Adapun Peraturan Menteri Sosial tersebut mengatur materi muatan naskah hukum serta pejabat yang berhak mengeluarkan, prosedur penyusunan, pengendalian penyusunan, serta pendokumentasian, penyebaran dan sosialisasi.

Selain itu, penyusunan naskah hukum di lingkungan Kementerian Sosial juga memperhatikan 3 (tiga) asas hukum sesuai dengan pendapat Safri Nugraha dalam buku Hukum Administrasi Negara, yaitu:

- a. asas yuridikitas (*rechtmatingheid*) yaitu, bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum secara umum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan);
- b. asas legalitas (*wetmatingheid*) yaitu, setiap tindakan pejabat administrasi negara harus mempunyai dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya);
- c. asas diskresi (*freiss ermessen*) yaitu, kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan

pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas tersebut di atas.

Dalam peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum yaitu:

- a. *lex specialis derogat legi lex generalis* yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum;
- b. *lex superiori derogat legi lex inferiori* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; dan
- c. *lex posteriori derogat legi lex priori* yaitu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.

Dalam melakukan identifikasi dan reviu peraturan perundang-undangan Kementerian Sosial memperhatikan asas-asas hukum sebagaimana di atas.

B. Kajian Peraturan Perundang-Undangn Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Tidak Harmonis Dengan Peraturan Bidang Lainnya

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Undang-Undang ini mengatur kewenangan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan konkuren menghasilkan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah pengawasan dan pembinaan terhadap wawasan bangsa. Terkait

urusan bidang sosial merupakan urusan pemerintahan konkuren yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib. Permasalahan yang timbul pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap sub urusan sosial bidang rehabilitasi sosial yaitu pembagian kewenangan pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerintah pusat menyelenggarakan rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, pemerintah daerah provinsi menyelenggarakan Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Permasalahan yang timbul pasca pembagian urusan tersebut di antaranya:

- a. Pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tidak seluruhnya mempunyai dukungan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan hasil penelitian Sekretariat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tahun 2016 secara umum, alokasi anggaran urusan sosial yang diteliti sangat kecil berkisar antara 0,1% (kota Palu) hingga 2,54% (kota Surabaya). Di beberapa daerah, tim peneliti bahkan tidak menemukan alokasi khusus untuk urusan sosial karena digabungkan dengan belanja urusan lain seperti urusan tenaga kerja ataupun urusan pemberdayaan masyarakat. Proporsi belanja dinas sosial di sebagian besar daerah yang diteliti masih didominasi oleh belanja tidak langsung, namun demikian terdapat juga beberapa daerah yang proporsi belanja langsungnya jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan belanja tidak langsung seperti Kota Kupang (77%), Kabupaten Pidie Jaya (88%), Kabupaten Bantul (78%),

Kabupaten Kulon Progo (72%), Kabupaten Bojonegoro (79%), dan Kabupaten Pare-Pare (74%).

Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial relatif kecil bahkan di beberapa daerah tidak dianggarkan sama sekali. Dari beberapa daerah yang berhasil diolah datanya ditemukan bahwa hampir sebagian besar bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan dan santunan dengan alokasi dan dampak yang kecil terhadap penyelesaian masalah.

- b. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan penyelenggaraan rehabilitasi sosial di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Fokus utama pemerintah daerah terutama daerah provinsi pasca diundangkannya Undang-Undang ini hanya pada permohonan pengalihan aset pemerintah pusat dalam hal ini unit pelaksana teknis yang menggunakan nomenklatur “panti sosial”. Berdasarkan pengalaman penyerahan aset “panti sosial” kepada pemerintah daerah pada tahun 2001 sebagian besar “panti sosial” telah beralihfungsi menjadi kantor pemerintahan yang peruntukannya bukan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan sosial di daerah menjadi isu nasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Setelah melakukan koordinasi dengan Asisten Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Sosial dialihfungsikan menjadi balai besar, balai, dan loka yang dimuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial,

Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Selain itu, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal, Kementerian Sosial telah mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Tidak ada pengaturan mengenai penanganan rehabilitasi sosial lintas pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

Permasalahan yang timbul akibat terjadinya kekosongan hukum dalam penanganan rehabilitasi sosial lintas pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga masing-masing pemerintah daerah menyatakan bahwa penanganan rehabilitasi sosial tersebut tidak menjadi tanggung jawab mereka. Untuk itu, Kementerian Sosial memberikan dukungan anggaran kepada daerah yang masih memerlukan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

melalui dana alokasi khusus bidang sosial yang saat ini Peraturan Menteriannya masih dalam proses penyusunan.

d. Rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum

Rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, namun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan pembangunan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan biaya bagi setiap Anak pelaku yang ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

e. Kewenangan kementerian/lembaga lain yang beririsan dengan Kementerian Sosial

Lampiran huruf H angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyatakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kewenangan menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Pemerintah daerah provinsi menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tersebut diasumsikan sebagai sebuah lembaga atau tempat yang serupa dengan lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial anak dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Lembaga tersebut ada di setiap pemerintahan baik di pusat, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kemudian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus. Dalam istilah kesejahteraan sosial terdapat objek yang akan menjadi sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang biasa disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya anak yang memerlukan perlindungan khusus. Hal tersebut juga terakomodasi dalam pengaturan organisasi dan tata kerja unit pelayanan teknis di bidang rehabilitasi sosial di bidang anak khususnya bidang anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kementerian Sosial telah melakukan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Anak di Lingkungan Kementerian Sosial dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan peran kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi koordinator dalam penanggulangan bencana. Sebelum Undang-Undang ini disahkan, Kementerian Sosial menjadi salah satu kementerian/lembaga yang melakukan penanganan terhadap korban bencana. Pasca Undang-Undang ini dalam penanggulangan bencana Kementerian Sosial memiliki kewenangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan pasca terjadinya bencana serta pemberian dukungan psikososial bagi korban bencana. Untuk itu Kementerian Sosial menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut pada Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor menyatakan institusi penerima wajib lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui upaya rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Untuk rehabilitasi medis menjadi kewenangan Menteri Kesehatan dan rehabilitasi sosial menjadi kewenangan Menteri Sosial, sedangkan Badan Narkotika Nasional dibentuk untuk melaksanakan tugas yang salah satunya adalah “meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat”. Sehingga seharusnya Badan Narkotika Nasional tidak melaksanakan kegiatan rehabilitasi yang menjadi kewenangan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial melainkan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk melaksanakan kewenangan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Kementerian Sosial telah melakukan simplifikasi terhadap Peraturan

Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dengan menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Korban Penyalahgunaan Narkotika Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Selain itu, Kementerian Sosial telah melakukan upaya penguatan organisasi dengan melakukan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dengan menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan kepada Menteri Sosial untuk mengoordinasikan penanganan fakir miskin di Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memberikan kewenangan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Sampai dengan saat ini, Kementerian Sosial telah mengupayakan berbagai macam upaya untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 seperti menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Verifikasi dan Validasi Data Terpadu penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan seperti masih memberikan kewenangan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam Kelompok

Kerja Pengelolaan Data yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.

Selain itu, nomenklatur data terpadu penanganan fakir miskin mengunci atau menyempitkan sasaran dari kewenangan Kementerian Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, dan korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Sehingga diperlukan data yang mencakup seluruh kewenangan Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Untuk itu, Kementerian Sosial akan menyusun Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 dan Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

BAB III PELAKSANAAN

A. Tahapan Pelaksanaan Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi peraturan perundang-undangan dilakukan melalui tahapan:

a. Pembinaan

Pembinaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial dilakukan dengan tahapan:

- 1) Melakukan identifikasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial atau Keputusan yang bersifat mengatur yang pernah diterbitkan.
- 2) Membuat daftar peraturan yang telah diterbitkan atau ditetapkan yang di dalamnya berisi uraian singkat mengenai materi muatan yang diatur dalam peraturan tersebut.
- 3) Melakukan revidu, evaluasi, dan analisa terhadap peraturan baik yang bersifat substansi atau materi muatan maupun format peraturan/keputusan yang bersifat mengatur atau teknik peraturan perundang-undangan.
- 4) Menyusun draf rekomendasi berupa regulasi atau deregulasi peraturan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi hasil identifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku baik bersifat internal maupun eksternal. Sosialisasi dilakukan dengan tahapan:

- 1) Menyosialisasikan hasil identifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 1954 sampai dengan Tahun 2018 kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial.
- 2) Menyosialisasikan berbagai materi peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial.
- 3) Menjaring masukan terhadap materi peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial.
- 4) Merevidu dan mengevaluasi materi peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial.

- 5) Menyusun rekomendasi berupa regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial.
- 6) Pengambilan kebijakan dalam bidang reformasi birokrasi di Kementerian Sosial.

c. Implementasi

Implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Sosial terutama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan upaya mengentaskan kemiskinan.

d. Pengukuran dampak peraturan perundang-undangan

Dampak dari penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial:

- 1) Terimplementasikannya peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial;
- 2) Efektifitas pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi Kementerian Sosial;
- 3) Meningkatnya kinerja Kementerian Sosial.

e. Regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil identifikasi, sosialisasi, implementasi, dan pengukuran dampak dari suatu peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial maka diperlukan regulasi terhadap materi muatan yang belum dilakukan pengaturan serta deregulasi terhadap peraturan yang tidak harmonis atau tidak efektif.

B. Hasil Identifikasi

Berdasarkan penelusuran dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial periode 1954-2018 tercatat sejumlah 476 (empat ratus tujuh puluh enam) peraturan yang telah diterbitkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

26	1990								1				1		1		1	4
27	1991								3						1		1	5
28	1992								1								2	3
29	1993																1	1
30	1994												1			1	1	3
31	1995				1				1								2	4
32	1996				3				2				2				2	9
33	1997	1			1				1				10	2				15
34	1998	1	1		1				4				21				1	29
35	1999								4				6			2	4	16
36	2000																1	1
37	2001			1														1
38	2002	1			1								1				5	8
39	2003			1	4								6				8	19
40	2004	1	1						1			1	1				2	7
41	2005								1								4	5
42	2006								1							1	3	5
43	2007	1		1	1		1		1				2		1		2	10
44	2008				1				1				1				4	7
45	2009	3			3				2								7	15
46	2010		1		3												6	10
47	2011	3	1		8												7	19
48	2012	2	3		13				5								15	38
49	2013		1	1	11				2							1	11	27
50	2014			2	16												7	25
51	2015		2		24												3	29
52	2016	1	1		19								1				8	30
53	2017		1	1	27												3	32
54	2018			1	29													30
Total		18	14	10	168	0	3	1	42	0	0	1	68	3	8	8	132	476

Berdasarkan tabel di atas dapat diberikan kategorisasi periode dan daya laku dengan rincian sebagai berikut:

1. Periode dan daya laku
 - a. Tahun 1954: 1 (satu) peraturan perundang-undangan (masih berlaku)
 - b. Tahun 1955: 1 (satu) peraturan perundang-undangan (perlu dikaji)
 - c. Tahun 1959: 1 (satu) peraturan perundang-undangan (tidak berlaku)
 - d. Tahun 1961: 2 (dua) peraturan perundang-undangan (1 masih berlaku, 1 perlu dicabut)
 - e. Tahun 1963: 1 (satu) peraturan perundang-undangan (tidak berlaku)
 - f. Tahun 1964: 2 (dua) peraturan perundang-undangan (1 masih berlaku, 1 perlu dikaji)
 - g. Tahun 1965: 1 (satu) peraturan perundang-undangan (tidak berlaku)
 - h. Tahun 1966: 1 (satu) peraturan perundang-undangan (tidak berlaku)
 - i. Tahun 1970: 1 (satu) peraturan perundang-undangan (tidak berlaku)
 - j. Tahun 1972: 1 (satu) peraturan perundang-undangan (perlu dicabut)
 - k. Tahun 1974: 3 (tiga) peraturan perundang-undangan (1 perlu dikaji, 2 tidak berlaku)
 - l. Tahun 1977: 1 (satu) peraturan perundang-undangan (tidak berlaku)
 - m. Tahun 1978: 1 (satu) peraturan perundang-undangan (perlu dikaji)
 - n. Tahun 1979: 5 (lima) peraturan perundang-undangan (1 masih berlaku, 4 tidak berlaku)
 - o. Tahun 1980: 3 (tiga) peraturan perundang-undangan (1 masih berlaku, 1 perlu dikaji, 1 tidak berlaku)
 - p. Tahun 1981: 6 (enam) peraturan perundang-undangan (3 perlu dikaji, 3 tidak berlaku)
 - q. Tahun 1982: 6 (enam) peraturan perundang-undangan

- (2 perlu dicabut, 4 tidak berlaku)
- r. Tahun 1983: 4 (empat) peraturan perundang-undangan
(1 masih berlaku, 1 perlu dicabut, 2 tidak berlaku)
 - s. Tahun 1984: 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan
(1 masih berlaku, 7 perlu dicabut, 3 tidak berlaku)
 - t. Tahun 1985: 2 (dua) peraturan perundang-undangan
(1 perlu dikaji, 1 tidak berlaku)
 - u. Tahun 1986: 4 (empat) peraturan perundang-undangan
(2 perlu dicabut, 2 perlu dikaji)
 - v. Tahun 1987: 2 (dua) peraturan perundang-undangan
(2 tidak berlaku)
 - w. Tahun 1988: 5 (lima) peraturan perundang-undangan
(2 masih berlaku, 1 perlu dicabut, 1 perlu dikaji, 1 tidak berlaku)
 - x. Tahun 1989: 4 (empat) peraturan perundang-undangan
(1 masih berlaku, 2 perlu dikaji, 1 tidak berlaku)
 - y. Tahun 1990: 4 (empat) peraturan perundang-undangan
(1 perlu dicabut, 1 perlu dikaji, 2 tidak berlaku)
 - z. Tahun 1991: 5 (lima) peraturan perundang-undangan
(3 perlu dikaji, 2 tidak berlaku)
 - aa. Tahun 1992: 3 (tiga) peraturan perundang-undangan
(1 perlu dikaji, 2 tidak berlaku)
 - bb. Tahun 1993: 1 (satu) peraturan perundang-undangan
(tidak berlaku)
 - cc. Tahun 1994: 3 (tiga) peraturan perundang-undangan
(1 perlu dicabut, 2 tidak berlaku)
 - dd. Tahun 1995: 4 (empat) peraturan perundang-undangan
(1 masih berlaku, 1 perlu dikaji, 2 tidak berlaku)
 - ee. Tahun 1996: 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan
(3 masih berlaku, 2 perlu dikaji, 2 perlu dicabut, 2 tidak berlaku)
 - ff. Tahun 1997: 15 (lima belas) peraturan perundang-undangan
(2 masih berlaku, 10 perlu dicabut, 1 perlu dikaji, 2 tidak berlaku)
 - gg. Tahun 1998: 29 (dua puluh sembilan) peraturan perundang-undangan
(3 masih berlaku, 21 perlu dicabut, 4 perlu dikaji, 1 tidak berlaku)
 - hh. Tahun 1999: 16 (enam belas) peraturan perundang-undangan
(6 perlu dicabut, 4 perlu dikaji, 6 tidak berlaku)
 - ii. Tahun 2000: 1 (satu) peraturan perundang-undangan

- (tidak berlaku)
- jj. Tahun 2001: 1 (satu) peraturan perundang-undangan
(masih berlaku)
- kk. Tahun 2002: 8 (delapan) peraturan perundang-undangan
(2 masih berlaku, 1 perlu dicabut, 5 tidak berlaku)
- ll. Tahun 2003: 19 (Sembilan belas) peraturan perundang-undangan
(5 masih berlaku, 6 perlu dicabut, 8 tidak berlaku)
- mm. Tahun 2004: 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan
(2 masih berlaku, 2 perlu dicabut, 1 perlu dikaji, 2 tidak berlaku)
- nn. Tahun 2005: 5 (lima) peraturan perundang-undangan
(1 perlu dikaji, 4 tidak berlaku)
- oo. Tahun 2006: 5 (lima) peraturan perundang-undangan
(1 perlu dikaji, 4 tidak berlaku)
- pp. Tahun 2007: 10 (sepuluh) peraturan perundang-undangan
(3 masih berlaku, 2 perlu dicabut, 2 perlu dikaji, 3 tidak berlaku)
- qq. Tahun 2008: 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan
(1 masih berlaku, 1 perlu dikaji, 1 perlu dicabut, 4 tidak berlaku)
- rr. Tahun 2009: 15 (lima belas) peraturan perundang-undangan
(6 masih berlaku, 2 perlu dikaji, 7 tidak berlaku)
- ss. Tahun 2010: 10 (sepuluh) peraturan perundang-undangan
(4 masih berlaku, 6 tidak berlaku)
- tt. Tahun 2011: 19 (tujuh belas) peraturan perundang-undangan
(12 masih berlaku, 7 tidak berlaku)
- uu. Tahun 2012: 38 (tiga puluh delapan) peraturan perundang-undangan
(18 masih berlaku, 5 perlu dikaji, 15 tidak berlaku)
- vv. Tahun 2013: 27 (dua puluh tujuh) peraturan perundang-undangan
(13 masih berlaku, 2 perlu dikaji, 12 tidak berlaku)
- ww. Tahun 2014: 25 (dua puluh lima) peraturan perundang-undangan
(18 masih berlaku, 7 tidak berlaku)
- xx. Tahun 2015: 29 (dua puluh sembilan) peraturan perundang-undangan
(26 masih berlaku, 3 tidak berlaku)
- yy. Tahun 2016: 30 (tiga puluh) peraturan perundang-undangan
(21 masih berlaku, 1 perlu dicabut, 8 tidak berlaku)

- zz. Tahun 2017: 32 (tiga puluh dua) peraturan perundang-undangan (29 masih berlaku, 3 tidak berlaku)
- aaa. Tahun 2018: 30 (tiga puluh) peraturan perundang-undangan (30 masih berlaku)

2. Bentuk dan daya laku

- a. Undang-undang
21 (dua puluh satu) undang-undang (18 masih berlaku, 3 tidak berlaku)
- b. Peraturan Pemerintah
25 (dua puluh lima) peraturan pemerintah (14 masih berlaku, 3 perlu dikaji, 8 tidak berlaku)
- c. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden yang bersifat mengatur
20 (dua puluh) Peraturan Presiden/Keputusan Presiden (10 masih berlaku, 1 perlu dikaji, 1 perlu dicabut, 8 tidak berlaku)
- d. Peraturan Menteri Sosial/Keputusan Menteri Sosial yang bersifat mengatur
410 (empat ratus sepuluh) Peraturan Menteri Sosial/Keputusan Menteri Sosial (168 masih berlaku, 42 perlu dikaji, 68 perlu dicabut, 132 tidak berlaku)

BAB IV

PENUTUP

Proses identifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial merupakan suatu upaya untuk menginventarisir peraturan perundangan yang telah diterbitkan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam proses ini, ditemukan sejumlah analisa terkait peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan, diantaranya masih adanya peraturan yang statusnya masih berlaku namun secara substansi tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, peraturan yang tumpang tindih satu sama lain, peraturan yang perlu pencabutan, dan berbagai permasalahan lainnya.

Hasil identifikasi dan evaluasi ini selanjutnya diharapkan akan mendukung upaya berkelanjutan terkait proses pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berdaya guna. Sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis akan menjadi instrumen dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 1954-2018

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1954

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian	Penyelenggaraan Undian	Masih Berlaku	Ketentuan mengenai mekanisme/penyelenggaraan dan sanksi sudah tidak sesuai	Sudah dilakukan kajian berupa Naskah Akademik tahun 2010	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
	-					

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1955

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.2-1-29/260 tentang Pelaksanaan Mengenai Pengusutan Perbuatan-Perbuatan yang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Dapat Dihukum	Pelaksanaan Mengenai Pengusutan Perbuatan-Perbuatan yang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Dapat Dihukum	Masih Berlaku		Perlu dilakukan pengkajian	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1959

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial	Tanda Kehormatan Satyalencana	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
	-					

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1961

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	Pengumpulan Uang atau Barang	Masih berlaku	Ketentuan mengenai mekanisme/penyelenggaraan dan sanksi sudah tidak sesuai	Sudah ada Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.1-1-16/1456 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang	Pelaksanaan pengumpulan uang atau barang	Masih berlaku	Materi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini.	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1963

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan	Petunjuk dalam menetapkan waktu tidak berlakunya pemakaian perumahan yang telah dikuasai oleh Negara atau Pemerintah Daerah	Tidak berlaku	-	Sudah tidak berlaku karena materi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perumahan.	Sudah tidak terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
	-					

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1964

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Masih berlaku	-	-	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
1.	Keputusan Presiden Nomor 347 Tahun 1964 tentang Panji Pembangunan Sosial	Panji Pembangunan Sosial	Masih Berlaku		Perlu dilakukan pengkajian	Biro Hukum
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
	-					

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1965

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
1.	Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 tentang Permainan Lotre Buntut sebagai Kegiatan Subversi	Penyelenggaraan Permainan Lotre Buntut sebagai Kegiatan Subversi	Tidak berlaku	-	Sudah tidak berlaku dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1973 tentang Penertiban Perjudian	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
	-					

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1966

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1966 tentang Peraturan Pemberian Penghargaan dan Jaminan Sosial Kepada para Wakawuri beserta Yatim Piatu Pahlawan yang Ditinggalkan Gugur	Pemberian Penghargaan dan Jaminan Sosial Kepada para Wakawuri beserta Yatim Piatu Pahlawan yang Ditinggalkan Gugur	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
	-					

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1970

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan	Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
	-					

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1972

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-11/274 Tahun 1972 tanggal 5 Desember 1972 tentang Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Warakawuri serta Yatim/Piatu dari Pahlawan	Pemberian Penghargaan/ Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Warakawuri serta Yatim/Piatu dari Pahlawan	Masih Berlaku	Materi sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini.	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1974

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Biro Hukum
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk. 3-3-8/239 Tahun 1974 tentang Peraturan Panti Sosial	Panti Sosial	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Kepada Badan Sosial Swasta	Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Kepada Badan Sosial Swasta	Masih Berlaku	-	Perlu dilakukan pengkajian	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1977

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
	-					

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1978

NO	Nomor Regulasi	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-53/78 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakuri Serta Yatim Piatu	Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakuri Serta Yatim Piatu	Masih Berlaku		Perlu dilakukan pengkajian	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1979

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Kesejahteraan Anak	Masih berlaku	Terdapat beberapa materi muatan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan	Perlu dilakukan simplifikasi dengan Peraturan yang mengatur tentang Anak	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
				Pengangkatan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak		
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/XI/79 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerbitan <i>Braille</i> Indonesia (BPBI) “Abiyoso”	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/XI/79 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Panti dan Sasana di Lingkungan Departemen Sosial	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Panti dan Sasana di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/KEP/XI/79 tentang Latihan Keahlian Pekerjaan Sosial	Latihan Keahlian Pekerjaan Sosial	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/1995 tentang Pelatihan Keahlian Pekerja Sosial	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/KEP/XI/79 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Perlengkapan dan Pemeliharaan Perlengkapan di Lingkungan Departemen Sosial	Pengelolaan Perlengkapan dan Pemeliharaan Perlengkapan	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1985 tentang Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan di Lingkungan Departemen Sosial	Biro Umum

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1980

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan	Pengumpulan Sumbangan	Masih Berlaku	Ketentuan mengenai mekanisme/penyelenggaraan sudah tidak sesuai karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 belum dicabut	-	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	Masih Berlaku	Perlu peninjauan kembali terhadap materi muatan Peraturan Pemerintah ini, karena Undang-Undang yang mendelegasikan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah dicabut.	Perlu dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Pemerintah ini	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tanggal 1 Oktober 1980 tentang Organisasi Sosial	Organisasi Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1981

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin	Masih Berlaku	-	Perlu peninjauan kembali terhadap materi muatan Peraturan Pemerintah ini, karena Undang-Undang yang mendelegasikan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah dicabut.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan fakir Miskin
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga,

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	13/HUK/KEP/I/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna	Taruna			11/HUK/1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna yang selanjutnya dicabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.	dan Kelembagaan Masyarakat
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat	Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/KEP/VIII/1981 tentang Panti Rehabilitasi Sosial	Panti Rehabilitasi Sosial Penderita Cacat	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Penderita Cacat				Kerja Panti Sosial selanjutnya dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi	

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Sosial	
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 1981 tentang Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Yang Diselenggarakan Oleh Badan Sosial	Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Yang Diselenggarakan Oleh Badan Sosial			Perlu dilakukan pengkajian	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar	Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.	Perlu dilakukan pengkajian.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1982

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/ III/1982 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh "Prof.Dr.Soeharso" di Surakarta	Organisasi dan Tatakerja	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof.Dr.Soeharso" yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Organisasi Sosial	Tata Cara dan Syarat-Syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan	Hubungan Sewa Menyewa Perumahan	Masih Berlaku	Materi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	Sudah tidak terkait dengan Tusi Kementerian Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Sewa Menyewa Perumahan			Pengganti Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perumahan		
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/KEP/V/1982 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pant Rehabilitasi Bekas Penderita Kusta	Organisasi dan Tata Kerja Pant Rehabilitasi Bekas Penderita Kusta	Tidak Berlaku		Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pant Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pant Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pant Sosial di Lingkungan Departemen Sosial	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
5.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 52/HUK/KEP/IX/1982	Badan Musyawarah Nasional	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut	Biro Hukum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	tentang Badan Musyawarah Nasional Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Keputusan Menteri Sosial ini	
6.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 64/HUK/KEP/XII/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Di Lingkungan Departemen Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yang selanjutnya diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1983

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
1.	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat	Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
2.	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	Masih Berlaku	-	Sudah dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis namun sampai saat ini	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					belum di tanda tangani Presiden.	
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/KEP/III/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental Di Temanggung	Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental Di Temanggung	Tidak Berlaku		Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial selanjutnya dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini di Temanggung yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/KEP/IV/1983 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Sosial	Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan bantuan Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1984

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
1.	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/KEP/I/1984 tentang Petugas Sosial Kecamatan (PSK)	Petugas Sosial Kecamatan	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan materi muatan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dimana urusan sosial bukan	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
				merupakan urusan absolut sehingga tidak mempunyai perwakilan vertikal di daerah		
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/KEP/II/1984 tentang Sumbangan Sosial Melalui STNK	Sumbangan Sosial Melalui STNK	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan materi muatan Undang-Undang tentang Keuangan Daerah dimana sumbangan melalui STNK masuk dalam rezim retribusi.	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/II/1984 tentang Pengelompokan Unit Kerja, Jalur Penjenjangan Jabatan dan Persyaratan Jabatan di Lingkungan	Pengelompokan Unit Kerja, Jalur Penjenjangan Jabatan dan Persyaratan Jabatan	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Departemen Sosial			Kementerian Sosial namun tidak dicabut secara tegas dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 100 Tahun 2011		
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/KEP/II/1984 tentang Ketentuan Pemberian kenaikan Pangkat Pilihan Di Lingkungan Departemen Sosial	Pemberian kenaikan Pangkat Pilihan Di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial. namun materi muatan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					17/HUK/1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial	
5.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/KEP/II/1984 tentang Persyaratan Pangkat Untuk Jabatan Struktural dan Nota Persetujuan Mutasi Pejabat Eselon III, IV dan V Di Lingkungan Departemen Sosial	Persyaratan Pangkat Untuk Jabatan Struktural dan Nota Persetujuan Mutasi Pejabat Eselon III, IV dan V	Tidak Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Sosial. Perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1997	Biro Organisasi dan Kepegawaian
6.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/KEP/II/1984 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Di	Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial karena	Perlu dilakukan simplifikasi peraturan mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang mengacu pada	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Lingkungan Departemen Sosial			terdapat perbedaan pengertian antara tenaga kesejahteraan sosial yang ada di dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/KEP/II/1984 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	
7.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/III/1984 tentang Satuan Tugas Sosial	Satuan Tugas Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial karena perlu disepakati satuan tugas sosial masuk dalam ranah	Perlu dilakukan simplifikasi peraturan mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
				tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial	Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	
8.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/KEP/IX/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Dari Luar Negeri oleh Badan-Badan Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Dari Luar Negeri oleh Badan-Badan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	Perlu dilakukan simplifikasi peraturan mengenai Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dan perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	Biro Perencanaan
9.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/KEP/XI/1984 tentang Petunjuk Teknis	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Anak	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri	Perlu ditetapkan peraturan menteri sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	Biro Perencanaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Anak Kurang Mampu Usia 7-12 Tahun Dalam Rangka Wajib Belajar Melalui Orang Tua Asuh	Kurang Mampu Usia 7-12 Tahun Dalam Rangka Wajib Belajar Melalui Orang Tua Asuh		Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga karena Bantuan untuk anak kurang mampu masuk dalam rezim bantuan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga		

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
10.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 34/HUK/KM/VI/1984 tentang Standarisasi Perabot Perkantoran di Lingkungan Departemen Sosial	Standarisasi Perabot Perkantoran di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 93A/HUK/1999 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Negara dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Departemen Sosial	Biro Umum

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1985

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
1.	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan	Badan Kebijakan Perumahan	Tidak berlaku	-	Sudah tidak berlaku karena materi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perumahan.	Sudah tidak terkait tugas dan fungsi Kementerian Sosial
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1985 tentang	Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan	Masih Berlaku	Materi muatan tidak mengikuti perkembangan dan	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan di Lingkungan Departemen Sosial			standar arsip nasional		

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1986

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/1986 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu	Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan,	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini.	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
				dan Keluarga Pahlawan Nasional		
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1986 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan Anak Nakal dengan Menggunakan Sarana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Lembang (Bandung), Gemah (Semarang) dan Mataram (Lombok)	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan Anak Nakal dengan Menggunakan Sarana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Masih Berlaku	Materi bertentangan dengan materi muatan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dimana terjadi perubahan unit layanan teknis milik Kementerian Sosial dan penyerahan aset Kementerian Sosial kepada pemerintah daerah	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini.	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/1986 tentang Program Diploma Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	Program Diploma Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	Masih Berlaku	Materi muatan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	(STKS) Bandung					
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/1986 tentang Penggunaan Rumah Jabatan Di Lingkungan Departemen Sosial	Penggunaan Rumah Jabatan Di Lingkungan Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Perlu dilakukan kajian Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Umum

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1987

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Pembimbing Sosial Masyarakat	Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Pembimbing Sosial Masyarakat	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
2.	Keputusan Menteri	Singkatan Nama	Tidak	-	Dicabut dengan	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Sosial Nomor 41/HUK/1987 tentang Singkatan Nama Unit Organisasi, Jabatan dan Kode Disposisi Di Lingkungan Departemen Sosial	Unit Organisasi, Jabatan dan Kode Disposisi Di Lingkungan Departemen Sosial	Berlaku		Peraturan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial	

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1988

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah	Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1988 tentang Pembakuan Istilah Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Departemen	Pembakuan Istilah Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial Dalam Bahasa Inggris	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial saat ini	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini.	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Sosial Dalam Bahasa Inggris					
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna	Pedoman Dasar Karang Taruna	Tidak Berlaku	-	Dicabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1988 tentang Pembentukan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Departemen Sosial	Pembentukan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Departemen Sosial	Masih Berlaku	-	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	Masih Berlaku	-	Sudah dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial namun sampai saat ini belum di tandatangani Menteri Sosial	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1989

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1989 tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	Masih Berlaku	-	Sudah dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial namun sampai saat ini belum di tandatangani Menteri Sosial	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 6/HUK/1989 tentang	Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial	Departemen Sosial			22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial selanjutnya dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 sampai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018	
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1989 tentang	Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian	Masih Berlaku	Ketentuan mengenai Tata Kerja Tim Penilai	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial	Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial		dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial sudah tidak sesuai		
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/1989 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat Yang Berjasa di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial	Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat Yang Berjasa di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial	-	-	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1990

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah	Pendidikan Pra Sekolah	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Sudah tidak terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Departemen Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi sudah diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
				Sosial		
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/1990 tentang Pelatihan Keahlian Pekerja Sosial	Pelatihan Keahlian Pekerja Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Sekretariat badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK/1990 tentang Satuan Pengamanan di Lingkungan Departemen Sosial	Satuan Pengamanan di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Satuan Pengamanan di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Umum

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1991

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa	Tidak Berlaku		Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Sudah tidak terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1991 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di Lingkungan Departemen Sosial	Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di Lingkungan Departemen Sosial	Masih Berlaku	-	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Departemen Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Departemen Sosial	Masih Berlaku	-	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Humas
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial	Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Organisasi dan Kepegawaian
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Ahli Pekerja Sosial di Bandung	Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Ahli Pekerja Sosial di Bandung	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/PEGHUK/2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1992

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Departemen Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 65/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Sosial Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial	
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional	Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional	Masih Berlaku	-	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1992 tentang Lembaga Rehabilitasi	Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Sosial Korban Narkotika				Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1993

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak	Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2010 tentang	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Taman Anak Sejahtera yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera	

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1994

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
1.	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS	Komisi Penanggulangan AIDS	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1994 tentang Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial Republik Indonesia Di Wilayah Kecamatan	Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial Republik Indonesia Di Wilayah Kecamatan	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan materi muatan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dimana urusan sosial bukan merupakan urusan absolut sehingga tidak mempunyai perwakilan vertikal di daerah	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Biro Organisasi dan Kepegawaian
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/1994 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah	Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1995

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti	Sekretariat Direktorat Jenderal rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 sampai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018	
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Kementerian Sosial yang selanjutnya diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Sosial RI	Petunjuk Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Sosial RI	Masih Berlaku	Materi muatan perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul		Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
4.	Keputusan Sosial 1/HUK/1995 Pengumpulan Sumbangan Korban Bencana	Menteri Nomor tentang untuk	Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1996

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan	Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan	Masih Berlaku	-	Perlu dilakukan kajian menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang- undangan lainnya.	Direktorat Kepahlawanan, keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1996 tentang Penggunaan Rumah Negara Sebagai Mes di Lingkungan	Penggunaan Rumah Negara Sebagai Mes di Lingkungan Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini.	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Departemen Sosial			Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/1996 tentang Prosedur Permohonan Penetapan Sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Prosedur Permohonan Penetapan Sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Kepahlawanan, keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Sosial	
5.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pekerja Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pekerja Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
6.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial	Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
7.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1996 tentang Pekerja Sosial Kecamatan (PSK)	Pekerja Sosial Kecamatan (PSK)	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
8.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat	Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
9.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 68/HUK/1996 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan bertentangan dengan konsep asuransi sehingga disepakati untuk dianggap tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini.	Sekretariat Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1997

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat	Penyandang Cacat	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Psikotropika	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 9/HUK/1997 tentang Tata Cara Penggunaan Logo Kesetiakawanan Sosial Nasional	Tata Cara Penggunaan Logo Kesetiakawanan Sosial Nasional	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Kepahlawnaan, Keberintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Masih Berlaku	Materi muatan bukan merupakan tugas dan fungsi Kementerian Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Biro Hukum
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di Luar Panti Sosial	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di Luar Panti Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah masuk dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak namun tidak dicabut secara tegas	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang	Perlu dilakukan kajian untuk revisi terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1997	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Sosial	Departemen Sosial		Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
5.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial	Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyuluhan Sosial namun tidak dicabut secara tegas	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
6.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1997 tentang Pembinaan Karang Taruna	Pembinaan Karang Taruna	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna namun tidak dicabut secara tegas	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Sosial
7.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1997 tentang	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia			Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial Lanjut Usia namun tidak dicabut secara tegas	Sosial ini.	
8.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/1997 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Di Lingkungan Direktorat Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial	Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial saat ini	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Biro Organisasi dan Kepegawaian
9.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Pengangkatan Anak	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Pengangkatan Anak	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
10.	Keputusan Menteri Sosial Nomor	Penanggulangan HIV/AIDS Bidang	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	70/HUK/1997 tentang Penanggulangan HIV/AIDS Bidang Sosial	Sosial		dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>	Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Korban Perdagangan Orang
11.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/1997 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Departemen Sosial	Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
12.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 72/HUK/1997 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di	Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Lingkungan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Departemen Sosial	Departemen Sosial		Kementerian Sosial		

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1998

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Kesejahteraan Lanjut Usia	Masih Berlaku	a. Terjadi perubahan paradigma dari <i>charity</i> kepada pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usia. b. Adanya diskriminasi penanganan antara lansia potensial dan lansia tidak potensial.	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
	Peraturan Pemerintah					

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Perubahan Peraturan Pemerintah ini sedang dalam proses permohonan penetapan ke Presiden	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar	Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 6A/HUK/1998	Tata Cara Pemulangan Nelayan Terlantar	Masih Berlaku	Materi muatan bukan merupakan	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang	Biro Hukum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Terlantar			tugas dan fungsi Kementerian Sosial	mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia	Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Departemen Sosial	Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
5.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin Yang Diselenggarakan oleh	Masih Berlaku	Materi muatan perlu disesuaikan	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Masyarakat		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi terkini.	Sosial ini.	Miskin
6.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Departemen Sosial	Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
7.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof.Dr.Soeharso Surakarta	Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof.Dr.Soeharso Surakarta	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
8.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1998 tentang Pedoman	Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Di Lingkungan Sekretariat	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Penyusunan Prosedur Kerja Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial	Jenderal Departemen Sosial		organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial	mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	
9.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1998 tentang Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Pahlawan dan Keluarga Pahlawan	Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Pahlawan dan Keluarga Pahlawan	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
10.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Sosial	Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Bina Karya (PSBK) Departemen Sosial			teknis di lingkungan Kementerian Sosial		
11.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (PRSBG) Kartini Temanggung	Uraian Tugas Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (PRSBG) Kartini Temanggung	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
12.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/1998 tentang Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter	Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/1998 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/1998 tentang Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
13.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran	Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Bidang Pembangunan	Masih Berlaku	Materi muatan perlu ditinjau kembali sesuai	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini	Sosial ini.	Sosial
14.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/1998 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/1998 tentang Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter	Pencabutan Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/1998 tentang Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
15.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Depsos	Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Depsos	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini.	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
16.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Penetapan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia	Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penetapan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia	Masih Berlaku	Materi muatan perlu ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri ini.	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
17	Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/1998 tentang Pemakaman Jenazah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dengan Upacara Resmi	Pemakaman Jenazah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dengan Upacara Resmi	Masih Berlaku	Materi muatan perlu ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri ini.	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
18.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
				Komunitas Adat Terpencil		
19.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/1998 tentang Pola Penyuluhan Sosial dan Strategi Komunikasi Untuk Penyuluhan Sosial	Pola Penyuluhan Sosial dan Strategi Komunikasi Untuk Penyuluhan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Pusat Penyuluhan Sosial
20.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa	Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
21.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen	Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Sosial					
22.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Departemen Sosial	Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
23	Keputusan Menteri Sosial Nomor 85/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP)	Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP)	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
24	Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Asuhan	Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Asuhan Anak (PSAA)	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Anak (PSAA)			teknis di lingkungan Kementerian Sosial		
25	Keputusan Menteri Sosial Nomor 96/HUK/1998 tentang Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
26	Keputusan Menteri Sosial Nomor 97/HUK/1998 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Bahan Pangan Beras Untuk Panti dan Pemukiman Sosial	Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Bahan Pangan Beras Untuk Panti dan Pemukiman Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan fungsi Kementerian Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Biro Hukum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
27	Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial	Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial	Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Biro Organisasi dan Kepegawaian

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 1999

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
1.	Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia	
2.	Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil	Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 04/HUK/1999 tentang Pemberian Izin dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Depsos	Pemberian Izin dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Depsos	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2007 tentang Pemberian Izin dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Sosial	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1999 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Kekacauan	Bantuan Sosial Untuk Korban Kekacauan	Masih Berlaku	Materi muatan masuk dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Sekretariat Direktorat Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1999 tentang Pemberian Izin Untuk Menjadi Pengurus Dan Atau Anggota Partai Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Di	Pemberian Izin Untuk Menjadi Pengurus Dan Atau Anggota Partai Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen	Masih Berlaku	Materi muatan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Lingkungan Departemen Sosial	Sosial				
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila	Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila	Masih Berlaku	Materi muatan harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perlu dilakukan kajian untuk penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tunan Sosial dan Korban Perdagangan Orang
5.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) Departemen Sosial	Uraian Tugas Pejabat Struktural Dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini	Biro Organisasi dan Kepegawaian
6.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial	Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
				Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu		
7.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/1999 tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
8.	Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 66/HUK/1999 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang Departemen Sosial Republik Indonesia	Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang Departemen Sosial Republik Indonesia	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo Departemen Sosial RI	Biro Umum
9.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 67/HUK/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis	Direktorat Pengelolaan Sumber dana Bantuan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
10.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD) Cibinong	Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD) Cibinong	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
11.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 93/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Fungsional Pekerja Sosial di Lingkungan Panti Sosial	Uraian Tugas Pejabat Fungsional Pekerja Sosial di Lingkungan Panti Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai jabatan fungsional pekerja sosial	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
12.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 93 A/HUK/1999 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Negara dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan	Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Negara dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan	Masih Berlaku	Materi muatan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Hukum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Depsos	Depsos				
13.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/1999 tentang Prioritas Aksesibilitas Yang Di Butuhkan Penyandang Cacat	Prioritas Aksesibilitas Yang Di Butuhkan Penyandang Cacat	Masih Berlaku	Materi muatan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Sosial ini	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
14.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 116/HUK/1999 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Depsos	Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Depsos	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/2008 tentang Jadwal Retensi Arsip	Biro Umum

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2000

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Sosial Nasional	Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Sosial Nasional	Tidak Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2001

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
1.	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Badan Pendidika, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
	-					

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2002

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Perlindungan Anak	Masih Berlaku	-	Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/PEGHUK/2002 tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial	Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2005 tentang Dana Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 58 / HUK / 2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 tentang Pedoman	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/PEGHUK/2002 tentang Izin Undian	Izin Undian	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor	Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	24/PEGHUK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial			2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	
5.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 45/PEGHUK/2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 51/HUK / 2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
6.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Sosial	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Sosial	Masih Berlaku	Sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini	Dalam proses perubahan	Biro Hukum
7.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2002 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen	Uraian Tugas Pejabat Struktural di Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri ini.	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Jenderal Departemen Sosial	Sosial				

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2003

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
1.	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Sosial	Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Sosial	Masih Berlaku	Sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini	Dalam proses perubahan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Sosial					
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Lingkungan Departemen Sosial	Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 75/HUK/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Departemen Sosial RI selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 183 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial	
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Departemen Sosial	Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Sosial	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Organisasi dan Kepegawaian
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2003 tentang Kebijakan dan Program Diklat Sumber Daya	Kebijakan dan Program Diklat Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2015 tentang	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Manusia Kesejahteraan Sosial			Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial		
5.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional	Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Hukum
6.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2003 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial Permanen	Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial Permanen	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Sekretariat Direktorat Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial
7.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang	Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini	Dalam proses perubahan	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Pnyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial				
8.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa di Cibinong	Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa di Cibinong	Tidak Berlaku	Sudah tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
9.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "PROF.DR.SOEHARSO" Surakarta	Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "PROF.DR.SOEHARSO" Surakarta	Tidak Berlaku	Sudah tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Rehabilitasi Sosial	
10.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" di Temanggung	Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" di Temanggung	Tidak Berlaku	Sudah tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
11.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini	Dalam proses perubahan	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
12.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/2003 tentang	Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia	Tidak Berlaku	Sudah tidak sesuai dengan organisasi dan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) "Abiyoso"	(BPBI) "Abiyoso"		tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial	Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	
13.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 sampai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
14.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2003 tentang	Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Rentan	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Hukum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Rentan			Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional		
15.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Departemen Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi, Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Sosial	
16.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/2003 tentang Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal	Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal	Masih Berlaku	Materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
				Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Sosial		
17.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2003 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2001-2004	Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2001-2004	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 186/HUK/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 – 2014 selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis	Biro Perencanaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Kementerian Sosial Tahun 2015-2019	
18.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2003 tentang Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial	Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2004

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia)	Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
1.	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia	Komisi Nasional Lanjut Usia	Masih Berlaku	Tidak dapat diimplementasikan karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan	Perlu Pencabutan Keputusan Presiden ini	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
				Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia tidak diamanatkan Komisi Nasional Lanjut Usia		
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial	Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Inspektorat Jenderal
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah	Tata Cara dan Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi ini	Perlu dilakukan kajian terhadap Keputusan Menteri ini	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Sosial
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor	Pungutan Biaya Dokumen Pengadaan	Masih Berlaku	Materi muatan bertentangan dengan ketentuan	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	35/HUK/2004 tentang Pungutan Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Sosial	Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Sosial		peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa	Menteri Sosial ini.	
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2004 tentang Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP)	Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial	-

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2005

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian	Izin Undian	Masih Berlaku	Sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini	Perlu dilakukan kajian terhadap Peraturan Menteri ini	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Sektor Dan Dunia Usaha	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Sektor Dan Dunia Usaha	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Usaha				Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial RI	Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial RI	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Biro Organisasi dan Kepegawaian
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang	Pedoman Dasar Karang Taruna	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga,

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Pedoman Dasar Karang Taruna				77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.	dan Kelembagaan Sosial
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2005 tentang Dana Kesejahteraan Sosial	Dana Kesejahteraan Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2006

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
1.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Biro Organisasi dan Kepegawaian/Biro Keuangan
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian	Izin Undian	Masih Berlaku	Materi muatan perlu ditinjau kembali dengan kondisi saat ini.	Dalam proses simplifikasi dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 66A/HUK/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Sosial	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 60 /HUK /2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Umum
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 76/HUK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan	Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2014 tentang	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Departemen Sosial RI	Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Departemen Sosial RI			Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial	
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana	Taruna Siaga Bencana	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana.	Sekretariat Direktorat perlindungan dan Jaminan Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2007

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Masih Berlaku	Materi muatan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Masih dalam kajian untuk dilakukan perubahan.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Sosial	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial	Biro Keuangan
	Peraturan Presiden/Keputusan Presiden					
1.	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian/Biro Keuangan
	Peraturan Menteri/Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial	Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial	Masih berlaku	Sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan sosial.	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini	-

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial	Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial	Masih berlaku	Tidak dicabut secara tegas namun materi muatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang.	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Keputusan Menteri Sosial ini.	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2007 tentang Pelaporan Harta	Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2013 tentang	Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Sosial	Lingkungan Departemen Sosial			Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial	
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Masih Berlaku	Materi muatan perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dalam proses penyusunan di unit kerja eselon I	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial	Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Negeri Dalam Bentuk Uang	
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center	Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center	Masih Berlaku	Materi muatan perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Perlu dilakukan kajian untuk perubahan.	Sekretariat Direktorat Perlindungan dan jaminan Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2008

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain	Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.	Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Peraturan Menteri Sosial ini.	Biro Hukum
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor	Pemberian Tugas Belajar dan Ijin	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian,

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial			Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial	dan Penyuluhan Sosial
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/2008 tentang Jadwal Retensi Arsip	Jadwal Retensi Arsip	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Sosial	
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Departemen Sosial	Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Departemen Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Perlu dilakukan kajian terkait eksistensi organisasi dan tata kerja sekretariat pengurus unit nasional korps pegawai Departemen Sosial	Biro Organisasi dan Kepegawaian
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 139/HUK/2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaannya di Lingkungan Departemen Sosial RI	Lambang/ Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaannya di Lingkungan Departemen Sosial RI	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 141/HUK/2008 tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2009	Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2009	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2009 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010	Biro Perencanaam

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2009

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Hukum
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial/Biro Hukum
3.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Narkotika	Masih Berlaku	-	Masih dalam proses perubahan	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/Biro Hukum
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2009 tentang	Pedoman Manajemen Pengelolaan Gudang di	Masih Berlaku	Materi muatan perlu menyesuaikan dengan Peraturan	Perlu dilakukan kajian terhadap Peraturan Menteri ini	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Pedoman Manajemen Pengelolaan Gudang di Lingkungan Departemen Sosial Tahun 2009	Lingkungan Departemen Sosial Tahun 2009		Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo Departemen Sosial RI	Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/ Logo Departemen Sosial RI	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan nomenklatur Kementerian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Perlu dilakukan kajian untuk perubahan.	Biro Umum
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial	Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial	Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Inspektorat Jenderal
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat	Direktorat rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Adiktif Lainnya	
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/2009 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Sosial	Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Persediaan Di Lingkungan Kementerian Sosial.	Biro Umum
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2009 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010	Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2010 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2011	Biro Perencanaan
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pantu Sosial di Lingkungan Departemen Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Pantu Sosial di Lingkungan Departemen Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 sampai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial	Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.	
10.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
11.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak	Persyaratan Pengangkatan Anak	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Sedang dalam proses perubahan	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
12.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Sedang dalam proses perubahan	Biro Perencanaan

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2010

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/2010 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di	Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Republik	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan penyelesaian Kerugian	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Indonesia			Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial	
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/2010 tentang Penetapan Peraturan Dasar Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia	Penetapan Peraturan Dasar Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia	Masih Berlaku	-	-	Pusat Penyuluhan Sosial
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera	Pendirian Taman Anak Sejahtera	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna	Pedoman Dasar Karang Taruna	Masih Berlaku	-	Akan dilakukan simplifikasi dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara	Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara	Masih Berlaku	Materi muatan perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Dalam proses dilakukan perubahan oleh Biro Umum	Biro Umum
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2010 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2011	Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2011	Tidak Berlaku	-	Dicabut setiap tahun terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019	Biro Perencanaan
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2010 tentang	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga				Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.	Sosial
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Sosial.	
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2010 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2011	Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2011	Tidak Berlaku	-	Dicabut setiap tahun terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019	Biro Perencanaan

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2011

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Penanganan Fakir Miskin	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin/Biro Hukum
2.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
3.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial/Biro Hukum
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2011 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum Di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Prosedur Penyusunan Naskah Hukum Di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum	Biro Hukum
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional pengasuhan Anak Untuk Lembaga	Standar Nasional pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Kesejahteraan Sosial Anak					
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/ HUK /2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia	Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 60 /HUK /2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 64 /HUK /2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I Di Lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I Di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Dalam proses penyusunan perubahan oleh Biro Perencanaan	Biro Perencanaan
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 91/ HUK /2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 128/HUK/2011 tentang Kampung Siaga Bencana	Kampung Siaga Bencana	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini terutama perlu peningkatan pengaturan dari kampung ke kabupaten/kota	Ada perubahan wacana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
10.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 148/HUK/2011 tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2012	Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2012	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Program Kegiatan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2013	Biro Perencanaan
11.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 176/HUK/2011 tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	
12.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 182/HUK/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial	
13.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 183/HUK/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia	Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Keuangan
14.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
15.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 186/HUK/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 – 2014	Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 – 2014	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan	Biro Perencanaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019	

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2012

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial	Konflik Sosial	Masih berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial/Biro Hukum
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Sistem Peradilan Pidana Anak	Masih berlaku	-	-	
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Masih Berlaku pada Kementerian Sosial	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Masih Berlaku	Masih berlaku	-	Dalam proses perubahan, masih dalam tahap pembahasan antar kementerian/lembaga	Biro Keuangan
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Masih berlaku	-	-	Biro Hukum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran	Penerima Bantuan Iuran	Masih berlaku	-	Sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial/Biro Hukum
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat	Pekerja Sosial Masyarakat	Masih berlaku	-	-	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera	Taman Anak Sejahtera	Masih berlaku	-	Perlu dilakukan kajian terhadap Peraturan Menteri ini	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi	Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika,	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya			Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Prosedur Penyusunan Naskah Hukum	Tidak berlaku		Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum	Biro Hukum
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	Masih berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dalam proses perubahan di Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Organisasi dan Kepegawaian
6	Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penghargaan	Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia				Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Mutasi Jabatan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Pola Mutasi Jabatan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dalam proses perubahan di Biro Organisasi dan Kepegawaian	Biro Organisasi dan Kepegawaian
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	Materi muatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan	Dalam proses perubahan di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Masih Berlaku	Sudah tidak sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Perlu dilakukan kajian untuk direvisi	Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
10.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
11.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peta Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Perlu di Harmonisasikan dan di Sinkronisasikan Tahun 2011 – 2014	Peta Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Perlu di Harmonisasikan dan di Sinkronisasikan Tahun 2011 – 2014	Tidak Berlaku	-	-	Biro Hukum
12.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2012 tentang Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan	Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2014 tentang Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Sosial	Biro Hukum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	yang Telah Diterbitkan				Yang Telah Diterbitkan	
13.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
14.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Masih Berlaku	-	Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
15.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Masih Berlaku	-	Telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	
16.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
17.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
18.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penataan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Akan Disusun Tahun 2011-2014	Penataan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Akan Disusun Tahun 2011-2014	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019 yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17	Biro Hukum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Tahun 2017 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019	
19.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
20.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat	Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat	Masih Berlaku	Materi muatan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.	Perlu dilakukan kajian terhadap Peraturan Menteri ini	Sekretariat Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial
21.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penggunaan Beras Reguler Untuk Korban	Pelaksanaan Penggunaan Beras Reguler Untuk Korban Bencana	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Bencana					
22.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melalui Kendari	Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melalui Kendari	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
23.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh	Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
24.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata	Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Tresna Werdha Minaula	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018 tentang	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Kerja Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari	Kendari			Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	
25.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial	Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
26.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
27.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Program Kegiatan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2013	Rencana Program Kegiatan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2013	Tidak Berlaku	-	Dicabut setiap tahun terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019	Biro Perencanaan
28.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana	Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana	Masih Berlaku	Materi muatan perlu menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan	Perlu dilakukan kajian untuk revisi terhadap Peraturan Menteri Sosial ini	Sekretariat Direktorat perlindungan dan Jaminan Sosial
29.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana	Taruna Siaga Bencana	Masih Berlaku	Materi muatan perlu menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan	Perlu dilakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Sosial ini	Sekretariat Direktorat perlindungan dan Jaminan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
30.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Keuangan
31.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
32.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Sosial	Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
33.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Inspektorat Jenderal

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2013

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah	Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin/Biro Hukum
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
1.	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia	Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
2.	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Masih Berlaku	Menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan	Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial	Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial	Sekretariat Inspektorat Jenderal
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan yang Dibiayai dengan BA.999.08 Di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan yang Dibiayai dengan BA.999.08 Di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Perencanaan
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2015 tentang	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial	
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2013 tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Masih Berlaku	Materi muatan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	Dalam proses penyusunan perubahan	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Masih Berlaku	Menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Masih Berlaku	-	Dalam proses penyusunan perubahan	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Sosial	Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
10.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Kementerian Sosial	Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Kementerian Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
11.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar	Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
12.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuhan Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Perencanaan
13.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2013 tentang Unit Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Sosial	Unit Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
14.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Persediaan Di Lingkungan Kementerian Sosial	Penatausahaan Persediaan Di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum
15.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
16.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Pegawai Di lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
17.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Sosial	Tidak berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Umum
18.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Masih berlaku	-	-	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
19.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Ke Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/ Kota	Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Ke Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2014	Tidak berlaku		Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2015	Biro Perencanaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Tahun Anggaran 2014					
20.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak	Pengasuhan Anak	Masih Berlaku	Menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan	Perlu dilakukan kajian untuk revisi	Direktorat rehabilitasi Sosial Anak
21.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal	Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang Dari Negara Malaysia Ke Daerah Asal	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
22.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna	Pemberdayaan Karang Taruna	Masih Berlaku	Menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan	Perlu dilakukan kajian untuk revisi	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
23.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Kecamatan				Sosial Kecamatan	
24.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial	Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai	Masih Berlaku	-	Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Organisasi dan Kepegawaian

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2014

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
1.	Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
2.	Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2014 tentang	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Tidak berlaku		Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Sosial	Kementerian Sosial			Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Sosial	
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Perencanaan
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil	Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana	Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Bencana					
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara	Masih Berlaku	-	-	Biro Keuangan
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Pegawai Di lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Pegawai	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Kementerian Sosial	
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial	Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
10.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial	Penyuluhan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Pusat Penyuluhan Sosial
11.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
12.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Serah Simpan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam Bidang Kesejahteraan Sosial	Tata Cara Serah Simpan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam Bidang Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum
13.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara	Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara	Masih Berlaku	-	-	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial				
14.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana	Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
15.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Tidak Berlaku	Menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
16.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Perencanaan
17.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019	Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019	Biro Hukum
18.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2014 tentang Identifikasi Peraturan	Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian	Masih Berlaku	-	-	Biro Hukum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Perundang-Undangan Kementerian Sosial Yang Telah Diterbitkan	Sosial Yang Telah Diterbitkan				
19.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Online Pelayanan Perizinan Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang	Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Online Pelayanan Perizinan Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem <i>Online</i>	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
20.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2015	Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2015	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016	Biro Perencanaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
21.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial	Pengelolaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Keuangan
22.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial	Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
23.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Dan Makam Pahlawan Nasional	Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Dan Makam Pahlawan Nasional	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2015

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Penanganan Konflik Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial/Biro Hukum
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2015 tentang Satuan Pengamanan Di Lingkungan Kementerian Sosial	Satuan Pengamanan	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional	Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana	Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana	Masih Berlaku	Menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara	Masih Berlaku	-	-	Biro Keuangan
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2015 tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga	Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Tidak Berlaku	Menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Penyelenggara Kesejahteraan Sosial				Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	
10	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial	Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
11	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
12	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Terhadap Komunitas Adat Terpencil					
13	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas	Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
14	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2015 tentang Aksesibilitas Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kementerian Sosial	Aksesibilitas Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
15	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
16	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penataan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial	Perencanaan dan Penataan Aparatur Sipil Negara	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
17	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional	Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
18	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial	Roadmap Reformasi Birokrasi	Masih Berlaku	-	-	Biro Perencanaan
19	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja	Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial					
20	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Biro Organisasi dan Kepegawaian
21	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	Masih Berlaku	Terhadap HTT dan HTDB yang masuk dalam kategori barang mewah seharusnya diperlakukan sama seperti hibah dalam negeri dalam bentuk uang yaitu masuk dalam DIPA	Dalam proses perubahan	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
				Kementerian Sosial perubahan		
22	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
23	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016	Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2015	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017	Biro Perencanaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
24	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum
25	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama	Kelompok Usaha Bersama	Masih Berlaku	Menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan	Perubahan dalam proses pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
26	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana	Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana	Masih Berlaku	Menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
27	Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019	Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019	Masih Berlaku	-	Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun	Biro Perencanaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019	

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2016

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/Biro Hukum
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Sumbangan Masyarakat Untuk Penanganan Fakir Miskin	Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Untuk Penanganan Fakir Miskin	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
	-					
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan	Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara	Masih Berlaku	Materi muatan belum harmonis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014	-	Biro Umum

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial			tentang Pengelolaan Barang Milik Negara		
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial	Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan	Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Masih Berlaku	-	-	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial					
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	Masih Berlaku	Materi muatan disesuaikan dengan kondisi saat ini	-	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial	Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Inspektorat Jenderal
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur	Masih Berlaku	Sudah selesai	Perlu Peraturan Menteri Sosial yang mencabut Peraturan Menteri ini	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur					
10.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	Masih Berlaku	Materi muatan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.	-	Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
11.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Sosial	Jadwal Retensi Arsip	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum
12.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi	Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial					
13.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintah Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintah Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Masih Berlaku	-	-	Biro Perencanaan
14.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
15.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Kahuripan di Sukabumi	Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
16.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras di Pati	Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
17.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata	Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus “Bahagia” di Medan	Immunodeficiency Virus			Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	
18.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya “Satria” di Batu Raden	Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
19.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus “Wasana Bahagia” di Ternate	Virus			Teknis Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	
20.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
21.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan ke Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota	Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan ke Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan ke Dinas Sosial Provinsi dan	Biro Perencanaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017				Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018	
22.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat
23.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019	Road Map Reformasi Birokrasi	Masih Berlaku	-	-	Biro Perencanaan
24.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di	Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Lingkungan Kementerian Sosial				2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	
25.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan	Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan	Masih Berlaku	-	Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
26.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual di Kementerian Sosial	Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual	Masih Berlaku	-	-	Biro Keuangan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
27.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Pengawasan Intern	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Inspektorat Jenderal
28.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2018 yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2019	Biro Perencanaan

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2017

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak	Pengasuhan Anak	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
1.	Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	Tunjangan Kinerja Pegawai	Masih Berlaku	-	-	Biro Keuangan
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial lanjut Usia

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Aset di Lingkungan Kementerian Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Aset di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial	Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Hukum
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia	Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial lanjut Usia
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial	Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial	Sosial				
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui	Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan					
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
10.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan	Program Keluarga Harapan	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
11.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas	Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil	Masih Berlaku	-	Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial				Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial	
12.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial	Standar Kompetensi Pekerja Sosial	Masih Berlaku	-	Dalam proses perubahan terhadap Lampiran I	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
13.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Inspektorat Jenderal
14.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial				Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	
15.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin	Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal penanganan Fakir Miskin
16.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	
17.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019	Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019	Masih Berlaku	-	-	Biro Hukum
18.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Tahun 2018	Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Tahun 2018	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran	Biro Perencanaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
					Tahun 2019	
19.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial	Manajemen Risiko	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Inspektorat Jenderal
20.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
21.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas	Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas	Masih Berlaku	-	Dalam proses perubahan	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
22.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017 tentang Restorasi	Restorasi Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Sosial					
23.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Umum
24.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2018	Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2018	Tidak Berlaku	-	Dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Tahun 2019	Biro Perencanaan
25.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
26.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Konflik Sosial	Konflik Sosial	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
27.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019	Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019	Masih Berlaku	-	-	Biro Perencanaan
28.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Masih Berlaku	-	Dalam proses perubahan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
29.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	Dalam proses perubahan oleh Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
30.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Korban Perdagangan Orang Dari Negara Malaysia Ke Daerah Asal	Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang Dari Negara Malaysia Ke Daerah Asal	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITERBITKAN/DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHUN PENGUNDANGAN
TAHUN 2018

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Undang-Undang					
	-					
	Peraturan Pemerintah					
	-					
	Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden					
1.	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional	Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri					
1.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Program Keluarga Harapan	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
2.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	Tunjangan Kinerja Pegawai	Masih Berlaku	-	-	Biro Keuangan
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial	Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>	Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
7.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>	Tatacara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>	Fungsional Penyuluh Sosial melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>				
9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Masih Berlaku	-	-	Biro Perencanaan
10.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
11.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
12.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Nasional	Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Nasional	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
13.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
14.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial	Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
15.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Tidak Mampu	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Miskin dan Orang Tidak Mampu					
16.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
17.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
18.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Penyandang Disabilitas				
19.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
20.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
21.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Masih Berlaku	-	Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
22.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Masih Berlaku	-	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian
23.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas	Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas	Masih Berlaku	-	-	Biro Perencanaan

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Tahun 2019	Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
24.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
25.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Pemberian Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
26.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Yang Berhadapan Dengan Hukum	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Masih Berlaku	-	-	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

NO	Nomor Regulasi dan Judul	Materi Pengaturan	Status	Permasalahan	Keterangan	Unit Pemrakarsa
	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum					
27.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Tahun 2019	Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah	Masih Berlaku	-	-	Biro Perencanaan
28.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Masih Berlaku	-	Dalam proses perubahan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
29.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2018 tentang Panduan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Sosial	Panduan Agen Perubahan	Masih Berlaku	-	-	Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA